

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/158 TAHUN 2019

TENTANG

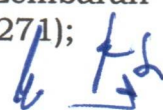
SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN  
MENENGAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan di bidang Pendidikan Menengah bagi Sekolah Menengah Pertama, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan maka perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Untuk Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1 1 d

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 66);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;

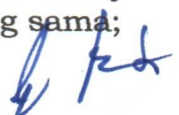
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah untuk Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kriteria Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

1. Kriteria Umum
  - a. masih beroperasi dan proses pembelajaran masih berlangsung;
  - b. terdaftar resmi yang dibuktikan dengan telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
  - c. bangunan berada di atas lahan yang tidak beresalah/tidak dalam sengketa;
  - d. bangunan berada di atas tanah yang hak atas tanahnya :
    - 1) atas nama Pemerintah Daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
    - 2) atas nama Yayasan atau Bdan Hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - e. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - f. mempunyai kepala satuan pendidikan yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan, dan khusus bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, kepala satuan pendidikan tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas yayasan/badan hukum.
  - g. memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah, kecuali SKB;
  - h. memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan penerima;
  - i. tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN dan/atau APBD) pada tahun anggaran yang sama;



j. untuk SD/SMP/SMA/SMK telah mengisi Data Pokok Pendidikan dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Kemdikbud pada laman sebagai berikut : <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>;

2. Kriteria Khusus

a. Rehabilitasi prasarana :

- 1) jenis prasarana yang akan direhabilitasi terdapat dalam menu kegiatan;
- 2) kondisi fisik ruang belajar rusak dengan tingkat kerusakan diatas 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen);
- 3) jika kondisi bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 65% (enam puluh lima persen) dapat dilakukan :
  - a) direhabilitasi dengan memperhitungkan biaya sesuai persentase tingkat kerusakan; atau
  - b) pembangunan baru kembali dengan syarat telah dilakukan penghapusan aset.

b. Pembangunan Prasarana :

- 1) jenis prasarana yang akan dibangun terdapat dalam menu kegiatan
- 2) tersedia lahan yang siap dibangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan jumlah ruang dikali standar luas bangun bersangkutan, tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olah raga, atau fungsi lain;
- 3) pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi satuan pendidikan yang memiliki jumlah rombongan belajar lebih besar daripada jumlah ruang kelas yang tersedia, jumlah ruang belajar belum mencukupi kebutuhan, perlu menambah daya tampung (akses) siswa baru sesuai ketentuan maksimal jumlah rombongan belajar per sekolah dan jumlah siswa per kelas sesuai NSP;
- 4) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus;
- 5) pembangunan ruang belajar lainnya dan prasarana penunjang pembelajaran diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang belum memiliki sama sekali prasarana dimaksud dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan; dan
- 6) Pembangunan prasarana belajar yang belum sesuai standar sarana dan prasarana belajar, dengan syarat telah dilakukan penghapusan aset atau proses penghapusan aset sedang berlangsung.

c. Pengadaan Sarana :

- 1) jenis sarana yang akan diadakan terdapat dalam menu kegiatan;
- 2) satuan pendidikan belum memiliki sama sekali sarana dimaksud dan/atau sudah memiliki namun jumlahnya masih kurang atau kondisinya tidak layak untuk digunakan;
- 3) pengadaan sarana belajar berupa peralatan laboratorium, koleksi buku perpustakaan, media pembelajaran, dan peralatan pembelajaran lainnya, diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang telah tersedia ruangan atau tempat menyimpan; dan

- 4) pengadaan sarana belajar berupa peralatan PJOK, peralatan seni dan budaya, dan peralatan kesenian tradisional, diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan ekstrakurikuler, tersedia instruktur/guru pengajar.

**KETIGA** : Besarnya Alokasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Maret 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Purwokerto;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Sekolah Penerima Bantuan yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR **420/158 TAHUN 2019**  
 TENTANG  
 SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG  
 PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH  
 PERTAMA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS  
 BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	NO	LOKASI KEGIATAN	OUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
				VOLUME	SATUAN	
1	1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak	1	SMP Negeri 2 Rembang	2	Ruang	120,000,000
		2	SMP Negeri 1 Karangreja	2	Ruang	120,000,000
		3	SMP Negeri 1 Karanganyar	1	Ruang	60,000,000
		4	SMP Negeri 1 Kaligondang	3	Ruang	180,000,000
		5	SMP Negeri 1 Kutasari	3	Ruang	180,000,000
		6	SMP Negeri 1 Pengadegan	3	Ruang	180,000,000
		7	SMP Negeri 1 Padamara	8	Ruang	400,000,000
		8	SMP Negeri 1 Mrebet	1	Ruang	60,000,000
		9	SMP Negeri 2 Kejobong	1	Ruang	60,000,000
		10	SMP Negeri 2 Karangreja	3	Ruang	180,000,000
		11	SMP Negeri 2 Karangmoncol	2	Ruang	120,000,000
		12	SMP Negeri 2 Kertanegara	2	Ruang	120,000,000
		13	SMP Negeri 2 Bukateja	1	Ruang	60,000,000
		14	SMP Negeri 3 Bobotsari	2	Ruang	120,000,000
		15	SMP Negeri 2 Pengadegan	2	Ruang	120,000,000
		16	SMP Negeri 3 Satu Atap Karangjambu	3	Ruang	216,000,000
		17	SMP N 5 Mrebet	2	Ruang	120,000,000
		18	SMP N 3 SA Rembang	4	Ruang	288,000,000
		19	SMP N 3 Kalimanah	2	Ruang	120,000,000
		20	SMP Abdi Negara Padamara	3	Ruang	180,000,000
		21	SMP Maarif NU Rembang	2	Ruang	120,000,000
		22	SMP Negeri 2 Bobotsari	2	Ruang	120,000,000
		23	SMP Negeri 1 Kalimanah	2	Ruang	120,000,000
		24	SMP Negeri 1 Kemangkon	2	Ruang	120,000,000
		25	SMP Negeri 1 Rembang	1	Ruang	60,000,000
		26	SMP Negeri 2 Purbalingga	4	Ruang	200,000,000
		27	SMP Muhammadiyah 1 Purbalingga	1	Ruang	60,000,000
		28	SMP NU Maarif Karanggedang	3	Ruang	150,000,000
		29	SMP Negeri 1 Bobotsari	2	Ruang	100,000,000
		30	SMP Negeri 4 Bobotsari	2	Ruang	100,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>71</b>		<b>4,154,000,000</b>
2.	Rehabilitasi Laboratorium IPA	1	SMP Negeri 1 Karanganyar	1	Ruang	140,000,000
		2	SMP Negeri 2 Kutasari	1	Ruang	140,000,000
		3	SMP Negeri 1 Kejobong	1	Ruang	140,000,000
		4	SMP Negeri 3 Kutasari	1	Ruang	140,000,000
		5	SMP ABDI NEGARA 1 Kaligondang	1	Ruang	140,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>		<b>700,000,000</b>
3	Rehabilitasi Laboratorium Komputer	1	SMP Negeri 1 Bukateja	1	Ruang	140,000,000
		2	SMP Negeri 1 Kejobong	1	Ruang	140,000,000
		3	SMP Negeri 5 Purbalingga	1	Ruang	140,000,000
		4	SMP Negeri 1 Kertanegara	1	Ruang	140,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>		<b>560,000,000</b>
4	Rehabilitasi Perpustakaan	1	SMP Negeri 1 Kaligondang	1	Ruang	110,000,000
		2	SMP Negeri 5 Purbalingga	1	Ruang	110,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>		<b>220,000,000</b>

6 f 3

NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	NO	LOKASI KEGIATAN	OUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
				VOLUME	SATUAN	
5	Rehabilitasi Ruang Guru	1	SMP Negeri 2 Rembang	1	Ruang	110,000,000
		2	SMP Negeri 3 Bobotsari	1	Ruang	70,000,000
		3	SMP Negeri 2 Bukateja	1	Ruang	110,000,000
		4	SMP Negeri 2 Kaligondang	1	Ruang	110,000,000
		5	SMP Negeri 2 Karangreja	1	Ruang	110,000,000
		6	SMP Negeri 1 Karanganyar	1	Ruang	110,000,000
		7	SMP Negeri 1 Bukateja	1	Ruang	110,000,000
		8	SMP Negeri 1 Kejobong	1	Ruang	110,000,000
		9	SMP Negeri 2 Karangjambu	1	Ruang	110,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>		<b>950,000,000</b>
6	Rehabilitasi Ruang Kantor	1	SMP Negeri 2 Rembang	1	Ruang	110,000,000
		2	SMP Negeri 2 Karangjambu	1	Ruang	110,000,000
		3	SMP Negeri 2 Kutasari	1	Ruang	110,000,000
		4	SMP Negeri 3 Karangmoncol	1	Ruang	110,000,000
		5	SMP Negeri 1 Karangreja	1	Ruang	110,000,000
		6	SMP Negeri 1 Kejobong	1	Ruang	110,000,000
		7	SMP Negeri 1 Bukateja	1	Ruang	110,000,000
		8	SMP Negeri 1 Karanganyar	1	Ruang	110,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>		<b>880,000,000</b>
7	Rehabilitasi Jamban	1	SMP Negeri 2 Bobotsari	1	Ruang	45,000,000
		2	SMP Negeri 1 Kejobong	1	Ruang	45,000,000
		3	SMP ABDI NEGARA 1 Kaligondang	1	Ruang	45,000,000
		4	SMP Negeri 2 Kertanegara	1	Ruang	45,000,000
		5	SMP Negeri 3 Kutasari	1	Ruang	45,000,000
		6	SMP Negeri 4 Kutasari	1	Ruang	45,000,000
		7	SMP Negeri 2 Kutasari	1	Ruang	45,000,000
		8	SMP Negeri 3 Karangmoncol	1	Ruang	45,000,000
		9	SMP Negeri 3 Mrebet	1	Ruang	45,000,000
		10	SMP Negeri 2 Karangmoncol	1	Ruang	45,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>		<b>450,000,000</b>
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1	SMP Negeri 6 Satu Atap Rembang	2	Ruang	367,560,000
		2	SMP Negeri 1 Karanganyar	2	Ruang	700,000,000
		3	SMP Negeri 1 Kejobong	1	Ruang	183,780,000
		4	SMP Negeri 2 Karangreja	1	Ruang	183,780,000
		5	SMP Negeri 4 Kutasari	1	Ruang	183,780,000
		6	SMP N 2 Kalimanah	1	Ruang	183,780,000
		7	SMP N 4 Bobotsari	1	Ruang	183,780,000
		8	SMP N 3 Kutasari	1	Ruang	183,780,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>		<b>2,170,240,000</b>
2	Pembangunan Laboratorium IPA beserta Perabotnya	1	SMP N 5 Mrebet	1	Ruang	315,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>		<b>315,000,000</b>
3	Pembangunan Perpustakaan besera Perabotnya	1	SMP N 2 Rembang	1	Ruang	285,000,000
		2	SMP N 2 Pengadegan	1	Ruang	285,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>		<b>570,000,000</b>
4	Pembangunan Jamban Siswa	1	SMP N 5 Mrebet	1	Paket	70,000,000
		2	SMP N 4 Satap Karangmoncol	1	Paket	70,000,000
		3	SMP N 2 Kemangkon	1	Paket	70,000,000
		4	SMP N 2 Karangreja	1	Paket	70,000,000
		5	SMP N 2 Karangmoncol	1	Paket	70,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>		<b>350,000,000</b>
						<b>11,319,240,000</b>

NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	NO	LOKASI KEGIATAN	OUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
				VOLUME	SATUAN	
1	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA	1	SMP Negeri 6 Satu Atap Rembang	1	Paket	22,050,000
		2	SMP Negeri 2 Karangmoncol	1	Paket	22,050,000
		3	SMP Negeri 1 Kalimanah	1	Paket	22,050,000
		4	SMP Negeri 3 Bukateja	1	Paket	22,050,000
		5	SMP Negeri 2 Purbalingga	1	Paket	22,050,000
		6	SMP Negeri 3 Pengadegan	1	Paket	22,050,000
		7	SMP Negeri 4 Kutasari	1	Paket	22,050,000
		8	SMP IT Harapan Ummat Purbalingga	1	Paket	22,050,000
		9	SMP Muhammadiyah 4 Kertanegara	1	Paket	22,050,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>		<b>198,450,000</b>
2	Pengadaan Peralatan Komputer	1	SMP Negeri 1 Kutasari	1	Paket	294,000,000
		2	SMP Negeri 2 Kemangkon	1	Paket	294,000,000
		3	SMP Negeri 2 Karangmoncol	1	Paket	294,000,000
		4	SMP Negeri 2 Bukateja	1	Paket	294,000,000
		5	SMP Negeri 2 Karangjambu	1	Paket	294,000,000
		6	SMP Negeri 3 Pengadegan	1	Paket	294,000,000
		7	SMP Negeri 4 Rembang	1	Paket	294,000,000
		8	SMP Negeri 1 Mrebet	1	Paket	294,000,000
		9	SMP N 3 Kutasari	1	Paket	294,000,000
		10	SMP N 1 Kaligondang	1	Paket	294,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>		<b>2,940,000,000</b>
3	Pengadaan Alat Peraga Matematika	1	SMP Negeri 2 Bobotsari	1	Paket	5,250,000
		2	SMP Negeri 1 Kalimanah	1	Paket	5,250,000
		3	SMP Negeri 1 Kaligondang	1	Paket	5,250,000
		4	SMP Negeri 1 Bukateja	1	Paket	5,250,000
		5	SMP Negeri 1 Karangmoncol	1	Paket	5,250,000
		6	SMP Negeri 1 Pengadegan	1	Paket	5,250,000
		7	SMP Negeri 1 Kutasari	1	Paket	5,250,000
		8	SMP Negeri 1 Karangreja	1	Paket	5,250,000
		9	SMP Negeri 2 Karangreja	1	Paket	5,250,000
		10	SMP Negeri 2 Karangmoncol	1	Paket	5,250,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>		<b>52,500,000</b>
4	Pengadaan Alat Peraga IPS	1	SMP Negeri 1 Karangreja	1	Paket	10,500,000
		2	SMP Muhammadiyah 5 Purbalingga	1	Paket	10,500,000
		3	SMP Negeri 2 Mrebet	1	Paket	10,500,000
		4	SMP Negeri 2 Karangmoncol	1	Paket	10,500,000
		5	SMP Negeri 3 Pengadegan	1	Paket	10,500,000
		6	SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol	1	Paket	10,500,000
		7	SMP IT Harapan Ummat Purbalingga	1	Paket	10,500,000
		8	SMP AL Yusufiyah	1	Paket	10,500,000
		9	SMP Negeri 3 Karangreja	1	Paket	10,500,000
		10	SMP Negeri 1 Karangmoncol	1	Paket	10,500,000
		11	SMP MAARIF NU Rembang	1	Paket	10,500,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>		<b>115,500,000</b>
5	Pengadaan Media Pembelajaran	1	SMP Negeri 2 Karangmoncol	1	Paket	42,000,000
		2	SMP Negeri 2 Kalimanah	1	Paket	42,000,000
		3	SMP Muhammadiyah 8 Kemangkon	1	Paket	42,000,000
		4	SMP Muhammadiyah 10 Tamansari	1	Paket	42,000,000
		5	SMP MAARIF NU Rembang	1	Paket	42,000,000
		6	SMP AL YUSUFİYAH	1	Paket	42,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>		<b>252,000,000</b>
6	Pengadaan Peralatan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	SMP Negeri 1 Karangmoncol	1	Paket	21,000,000
		2	SMP Negeri 1 Karangreja	1	Paket	21,000,000
		3	SMP Negeri 2 Rembang	1	Paket	21,000,000
		4	SMP Negeri 2 Karangjambu	1	Paket	21,000,000
		5	SMP Negeri 3 Pengadegan	1	Paket	21,000,000
		6	SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol	1	Paket	21,000,000
		7	SMP Muhammadiyah 5 Purbalingga	1	Paket	21,000,000
		8	SMP MAARIF NU Rembang	1	Paket	21,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>		<b>168,000,000</b>



NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	NO	LOKASI KEGIATAN	OUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
				VOLUME	SATUAN	
7	Pengadaan Sarana Seni dan Budaya	1	SMP Negeri 3 Karangreja	1	Paket	21,000,000
		2	SMP Negeri 3 Purbalingga	1	Paket	21,000,000
		3	SMP Negeri 3 Pengadegan	1	Paket	21,000,000
		4	SMP Negeri 2 Karangjambu	1	Paket	21,000,000
		5	SMP Negeri 2 Karangmoncol	1	Paket	21,000,000
		6	SMP Negeri 1 Karangreja	1	Paket	21,000,000
		7	SMP Negeri 1 Karangmoncol	1	Paket	21,000,000
		8	SMP Negeri 3 Kutasari	1	Paket	21,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>		<b>168,000,000</b>
8	Pengadaan Alat Kesenian	1	SMP Negeri 1 Kertanegara	1	Paket	50,000,000
			<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>		<b>50,000,000</b>
<b>DANA FISIK</b>						<b>15,263,690,000</b>
1.	Honorarium Fasilitator	1				255,500,000
2	Penyelenggaraan rapat koordinasi	2				1,010,000
<b>DANA OPERASIONAL</b>						<b>256,510,000</b>
						<b>15,520,200,000</b>

Pt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI